

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Baiq Dwi Apryana Eristanti¹, I Nyoman Nugraha Ardana Putra²

¹Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, dwiapryana2016@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, ibobid@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: date

Revisi pertama tanggal: date

Diterima tanggal: date

Tersedia online tanggal dd/mm/yyyy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah dari perspektif faktor kontekstual organisasi, yaitu perspektif komitmen organisasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar pada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan 99 responden yang terdiri dari pegawai bagian akuntansi, PPK, bendahara pengeluaran dan staf akuntansi. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kata Kunci: ketepatan waktu, komitmen organisasi, SPI, sistem akuntansi keuangan daerah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of organizational commitment, internal control system and regional financial accounting system on the timeliness of financial reporting. The data collection of this study uses a questionnaire distributed on OPD in the West Lombok Regency Government. The population of the study is the accounting department employees and the research sample as many as 99 respondents, namely PPK, treasurer of expenditure and accounting staff in the West Lombok Regency Government. The analytical method used is multiple linear analysis. The results of hypothesis testing are organizational commitment and the internal control system weakens the effect on the timeliness of financial reporting. The regional financial accounting system has no effect on timeliness.

Keywords: Timeliness, Organizational Commitment, Local Financial Accounting System.

©2018 FEB UNRAM. All rights reserved

1. Pendahuluan

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2013, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Rachmawati, 2014).

Dalam organisasi sektor publik, laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah yang akan digunakan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Astrawan, 2016). Dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ketepatan waktu (*timeliness*) adalah batasan penting dalam publikasi laporan keuangan. Ketepatan atau ketepatwaktuan laporan keuangan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Studi terdahulu mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi sebagai suatu keadaan psikologis dengan karakteristik, meyakini dan menerima tujuan dan nilai yang dimiliki oleh organisasi, kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh demi organisasi dan mempunyai keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja dengan penuh dedikasi karena menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang penting (Allen *et al.*, 1993). Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud apabila diikuti oleh komitmen organisasi yang kuat (Ridha dan Basuki, 2012). Semakin seorang staf pelaporan keuangan memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan (Luthans, 2006).

Faktor lain yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu sistem pengendalian intern. Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Drama, 2014). Dalam hal tertentu laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Astrawan, 2016). Dengan demikian semakin baik pengendalian intern dalam instansi pemerintah maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Rosalin & Kawedar, 2011).

Faktor terakhir yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Nurillah dan Muid, 2014). Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan (Bastian, 2007:4). Studi Murapi (2016) mengungkapkan semakin diterapkan SAKD akan semakin baik prosedur penerapan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dalam rangka pertanggung jawabannya pelaksanaan APBD menjadi lebih berkualitas.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki 10 (sepuluh) kabupaten dan kota, salah satunya adalah Kabupaten Lombok Barat. Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sebagai badan yang memeriksa, meskipun Kabupaten Lombok Barat setiap tahun mendapat opini WTP tetapi BPK selalu menemukan masalah terkait dengan sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi. Adapun permasalahan lain yang terjadi terkait komitmen organisasi, serta ketidaktepatan waktu pelaporan yang tidak seharusnya terjadi.

Temuan studi sebelumnya tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang beragam. Rosalin dan Kawedar (2011) yang menguji keterkaitan komitmen organisasi dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi secara positif berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, meskipun studi Amalia (2014) dan Rachmawati (2014) menemukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian lain terkait dengan sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dilakukan oleh Sembiring (2007) dan Astrawan *et al.* (2016) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu. Hasil penelitian yang sejalan ditemukan dalam studi Rachmawati (2014), meskipun Rosalin dan Kawedar (2011), Amalia (2014) dan Mutiana (2017) tidak menemukan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berkaitan dengan penelitian tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) belum ada yang spesifik langsung meneliti terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, tetapi lebih kepada analisis tentang kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Drama (2014), Murapi (2016) dan Mokoginta *et al.* (2017) menemukan hasil bahwa SAKD berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian Latifah (2017) mendapatkan hasil yang sebaliknya dimana hasil SAKD tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang kontradiktif memotivasi tujuan penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh komitmen organisasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah tentang pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam melakukan pelaporan keuangan tepat waktu sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat untuk kepentingan publik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

Kerangka Teoritis

Stewardship theory mengargumentasikan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Dengan kata lain, *Stewardship Theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Daniri, 2005). Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkapkan segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut (Mardiasmo (2009). Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka pekerja akan merasa senang dalam bekerja, sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya melalui laporan keuangan (Jaros, 2007). *Stewardship Theory* digunakan dalam penelitian ini untuk menjustifikasi bahwa pemerintah daerah dalam fungsinya sebagai pelayan publik (*steward*) harus patuh terhadap kewajiban untuk melakukan pelaporan keuangan tepat waktu sehingga dapat menggunakannya untuk pengambilan keputusan tepat untuk kepentingan publik.

Teori kepatuhan atau *Compliance Theory* adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen (Lunenburg, 2012). Teori kepatuhan lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Pandangan Tyler (1990) menyatakan dua perspektif dasar dalam memahami kepatuhan pada hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku, sedangkan perspektif normatif berkaitan dengan nilai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Dalam relevansinya dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, Teori Kepatuhan digunakan untuk memahami fenomena kepatuhan yang berkaitan dengan ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan Undang-undang yang berlaku, termasuk dengan upaya pemerintah daerah untuk melaporkan hasil kinerja keuangan pemerintah secara tepat waktu sesuai regulasi sehingga dapat menghasilkan kualitas informasi keuangan yang akurat, andal dan dapat dipercaya.

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Mowday *et al*, 1979). Menurut Allen *et al*. (1993), pegawai yang memiliki komitmen organisasi akan bekerja dengan penuh dedikasi karena menganggap bahwa pencapaian tujuan organisasi merupakan hal yang penting. Pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi juga memiliki pandangan yang positif dan akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi, hal ini membuat pegawai memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab lebih demi keberhasilan organisasi. Pada konteks pemerintahan, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan menjadi relatif lebih tepat. Dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi akan dapat mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang *reliable* sesuai dengan SAP (Modo *et al.*, 2016).

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal yang baik harus didukung oleh sistem dan prosedur yang memadai, tenaga pelaksana yang memiliki integritas dan memenuhi kualifikasi profesi, dan adanya pemisahan tugas yang jelas setiap bidang kegiatan. Upaya untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan dan menguji ketaatan dalam pelaksanaan struktur pengendalian internal adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh pengendalian tersebut dilaksanakan (Purwono, 2004: 125). Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No. 60 tahun 2008, adalah meliputi: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian resiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi dan (5) pemantauan pengendalian intern.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah merupakan sistem desentralisasi. Rasdianto (2013:6) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan, 2010:201). Lebih lanjut dinyatakan dalam Nordiawan (2010:201) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa ketepatan waktu laporan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Hendriksen dan Breda (2000:145) menyatakan bahwa informasi tidak dapat relevan jika tidak tepat waktu, yaitu hal itu harus tersedia bagi pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansinya, tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Pengukuran ketepatan waktu menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 adalah tersedianya informasi saat dibutuhkan serta laporan yang sistematis dan teratur.

Pengembangan Hipotesis

Stewardship Theory mengargumentasikan bahwa untuk kepentingan organisasi manajemen termotivasi untuk lebih fokus pada tujuan sasaran utama daripada tujuan-tujuan individu. Luthans (2006) menyatakan bahwa keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi merupakan komitmen organisasi. Lebih lanjut Jaros (2007) mengungkapkan komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, studi Luthans (2006) menyatakan bahwa semakin seorang staf pelaporan keuangan memiliki komitmen organisasi yang tinggi maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan. Sejalan dengan temuan sebelumnya, hasil penelitian Rosalin dan Kawedar (2011) juga mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Mutuana (2017). Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Komitmen organisasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan serta tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal pada pemerintahan (Nurillah dan Muid, 2014). Dalam hal tertentu laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Astrawan, 2016). Hasil penelitian Sembiring (2007) dan Astrawan *et al.* (2016) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kepatuhan sebagaimana diargumentasikan dalam Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Andini dan Yusrawati, 2015). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah daerah (Rahayu *et al.*, 2014). Menurut Bastian (2007:4) perlu pemahaman terhadap sistem akuntansi untuk dapat memahami dengan baik penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004:56). Temuan studi sebelumnya menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Drama, 2014; Murapi, 2016; dan Mokoginta, 2017). Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah, maka secara tidak langsung laporan keuangan akan mengikuti alur dari sistem baik manual ataupun yang sudah terkomputerisasi. Oleh karena itu, laporan keuangan akan selesai tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi pada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah kabupaten Lombok barat. Teknik pengambilan

sampel penelitian ini dengan metode *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti antara lain : a) pegawai Negeri Sipil, b) pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/ keuangan, c) pegawai yang merupakan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), (d) bendahara pengeluaran dan staf akuntansi yang menyusun laporan keuangan. Jumlah sampel pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu sebanyak 3 (tiga) responden sehingga diperoleh 99 responden.

Variabel diukur dengan skala *likert 5* (lima) point. Komitmen organisasi diukur dengan indikator : identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Sistem Pengendalian Intern (SPI) diukur dengan indikator : lingkungan pengendalian terhadap tugas, penilaian risiko terhadap kegiatan, kegiatan pengendalian terhadap transaksi, informasi dan komunikasi terhadap laporan kegiatan dan pemantauan terhadap mekanisme. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diukur dengan indikator : kesesuaian sistem dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, pencatatan transaksi, bukti disetiap transaksi, pencatatan kronologis, pengklasifikasian transaksi, pengklasifikasian transaksi dan laporan keuangan setiap periode. Ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur dengan indikator: tersedianya informasi saat dibutuhkan dan laporan yang sistematis dan teratur.

Alat regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu menguji uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta data yang dihasilkan memiliki distribusi normal. Apabila tidak dijumpai adanya multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, maka asumsi klasik telah terpenuhi. Model regresi dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = ketepatan waktu pelaporan keuangan

X1 = komitmen organisasi

X2 = sistem pengendalian intern

X3 = sistem akuntansi keuangan daerah

a = konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika X = 0

b = arah koefisien regresi,

e = error

4. Hasil dan Pembahasan

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Barat. Adapun tingkat pengembalian kuisisioner disajikan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Tanggapan Responden

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	99
Kuesioner yang tidak kembali	11
Kuesioner yang dapat diolah	88
Tingkat pengembalian kuesioner	88,9 %

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui tingkat pengembalian kuesioner sebesar 88,9%. Kuesioner yang di distribusikan pada penelitian ini sebanyak 99 kuesioner, sedangkan kuisisioner yang tidak dikembalikan 11 sehingga kuisisioner yang dapat diolah lebih lanjut adalah 88.

Dalam analisis deskriptif statistik menyajikan data penelitian yang menginformasikan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum setiap variabel. Tabel 2 berikut ini menyajikan hasil data deskriptif statistik variabel komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tabel 2. Deskriptif Statistik

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean
X1	88	21.00	34.00	26.8409
X2	88	24.00	35.00	27.6023
X3	88	22.00	31.00	26.5909
Y	88	20.00	30.00	26.7955

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui variabel komitmen organisasi (X1) nilainya berkisar antara 21-34, artinya nilai yang paling rendah (minimum) yaitu 21 dan yang paling tinggi (maksimum) yaitu 34 dan rata-rata (mean) sebesar 26,8409. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) nilainya berkisar antara 24-35, artinya nilai yang paling rendah (minimum) yaitu 24 dan yang paling tinggi (maksimum) yaitu 35 dan rata-rata (mean) sebesar 27,6023. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X3) nilainya berkisar antara 22-31, artinya nilai yang paling rendah (minimum) yaitu 22 dan paling tinggi (maksimum) yaitu 31 dan rata-rata (mean) sebesar 26,5909. Variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y) nilainya berkisar antara 20-30, artinya nilai yang paling rendah (minimum) yaitu 20 dan paling tinggi (maksimum) yaitu 30 dan rata-rata (mean) sebesar 26,7955.

Untuk menguji validitas dari pertanyaan kuisisioner kriteria yang harus dipenuhi yaitu jika nilai korelasi $\geq 0,30$, maka item-item pertanyaan dari kuisisioner adalah valid dan jika nilai korelasi $\leq 0,30$, maka item-item pertanyaan dari kuisisioner adalah tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas pada penelitian ini, semua item pertanyaan pada variabel dependen dan variabel independen adalah valid karena memiliki nilai korelasi masing-masing item yang lebih besar dari 0,30. Reliabilitas variabel diuji dengan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$, namun jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrumen penelitian tersebut dinyatakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, setiap variabel menunjukkan nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. Berturut-turut nilai *cronbach alpha* variabel komitmen organisasi (X1) dan variabel sistem pengendalian intern adalah 0,795 dan 0,86. Nilai *cronbach alpha* untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X3) dan variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y) adalah 0,616 dan 0,832. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel.

Uji asumsi klasik yang dilakukan telah memenuhi persyaratan uji asumsi normalitas, heterokedastisitas dan multikolinieritas. Uji normalitas dilakukan dengan pendekatan *Kolmogorov Smirnov*, menunjukkan nilai *asympt.Sig.(2-tailed)* $0,784 > \alpha$ (0,05), sehingga data residual terdistribusi normal. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser didapatkan nilai probabilitas signifikansi untuk variabel komitmen organisasi sebesar $0,139 > 0,05$. Nilai probabilitas signifikansi untuk variabel

sistem pengendalian intern sebesar $0,326 > 0,05$, sedangkan nilai probabilitas signifikansi untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar $0,168 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi ini. Uji multikolinieritas dapat dilihat melalui *variance inflation factor* (VIF) yang memiliki tidak lebih dari 10, begitu pula untuk nilai tolerance yang memiliki nilai kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritasgresi

Hasil uji regresi linier berganda dievaluasi dari uji ketepatan model (Uji F), koefisien determinasi dan uji signifikansi parameter individual (uji t) atau uji hipotesis. Ringkasan hasil uji regresi linier berganda disajikan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linier Berganda

F test	= 63,757				
Signifikansi	= 0,000				
R Square	= 0,695				
Adjusted R Square	= 0,684				
	Unstandardized		Standardize		
	Coefficients		d		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	1.562	2.220		.704	.483
KO	.440	.087	.478	5.051	.000
SPI	.452	.075	.441	5.998	.000
SAKD	.035	.106	.028	.331	.742

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi $\alpha < 0,05$. Dari uji F diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ sehingga model regresi layak digunakan untuk prediksi. Dengan interpretasi lain menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi (X1), sistem pengendalian intern (X2) dan sistem akuntansi keuangan daerah (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Y). Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,684 artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 68,4%, dan sisanya 31,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil pengujian hipotesis signifikan jika *p-value* lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui hanya variabel komitmen organisasi (KO) dan sistem pengendalian intern (SPI) yang memiliki nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan sehingga hipotesis 1 dan 2 diterima. Adapun hipotesis 3 atau Sistem Akutansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak signifikan karena *p-value* lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ sehingga hipotesis 3 tidak didukung.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan keuangan.

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rosalin & Kawedar (2011) yang menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu,

meskipun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian Amalia (2014) dan Rachmawati (2014) yang menemukan hasil yang berlawanan dimana komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah memiliki komitmen organisasi yang tinggi dalam hal pelaporan keuangan. Pengelola keuangan yang memiliki komitmen organisasi akan mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sebaliknya pengelola keuangan yang memiliki komitmen organisasi yang rendah, maka laporan keuangan berpotensi tidak disajikan tepat waktu sehingga mengurangi kualitas laporan keuangan. Dalam konteks teori penatalayanan atau *Stewardship Theory*, pengelola keuangan sebagai pelayan publik yang memiliki komitmen organisasi akan melakukan yang terbaik dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan informasi yang berkualitas, karena salah satu karakteristik dari informasi yang berkualitas yaitu informasi yang dilaporkan tepat waktu.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sembiring (2007) dan Astrawan *et al.* (2016) yang memperoleh hasil sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun demikian hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Amalia (2014) dan Mutiana (2017) yang memberikan hasil yang tidak signifikan. Dalam konteks teori kepatuhan (*compliance theory*), pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah menerapkan sistem pengendalian intern (SPI). Sistem pengendalian intern ini membantu pengelola keuangan untuk meminimalisasi kesalahan yang bisa saja terjadi dalam pembuatan laporan keuangan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga membuat laporan keuangan menjadi berkualitas. Sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai akan membuat laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu dengan memenuhi kualitas pelaporannya sesuai dengan sistem dan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga menegaskan agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Latifah (2017) yang mendapatkan hasil bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan hasil studi Drama (2014), Murapi (2016) dan Mokoginta (2017) yang mengkonfirmasi bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sudah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat masih kurang dipahami oleh pengelola keuangan, sehingga pengelola keuangan membutuhkan waktu dalam hal membuat laporan keuangan. Kurang pemahannya pengelola keuangan ini menyebabkan ketidaktepatan waktu dalam hal pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil ini juga menjelaskan permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terutama masih banyaknya rekomendasi yang diberikan oleh BPK yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengindikasikan sistem akuntansi keuangan daerah ini masih kurang dipahami. Sejalan dengan argumentasi Latifah (2017), hal ini karena sistem akuntansi keuangan dianggap tidak mudah digunakan sehingga kurang mendukung dalam hal pemrosesan data-data yang diinput. Dalam konteks teori kepatuhan (*compliance theory*), sistem akuntansi keuangan daerah sudah diterapkan tetapi masih kurang dipahami. Penerapan Sistem akuntansi keuangan daerah memudahkan dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan. Di sisi lain, untuk mencapai sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan lebih membutuhkan waktu untuk penyesuaiannya. Menurut Suwardjono (2005) bahwa dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatn harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan/presisi (*accuracy/precision*) atau keandalan. Jadi terdapat *trade-off* antara ketepatanwaktuan dan keandalan/ reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatn dari pelaporan keuangan.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang

Hasil penelitian menyatakan bahwa komitmen organisasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sudah memiliki komitmen organisasi yang tinggi dalam hal pelaporan keuangan yang akan mendorong pengelola keuangan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga laporan keuangan tersebut menyajikan informasi berkualitas yang tepat waktu. Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dapat memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan, yang ketepatan waktu pelaporan menjadi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Namun demikian, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan mengindikasikan SAKD yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetapi masih kurang dipahami oleh pengelola keuangan baik secara manual maupun terkomputerisasi, sehingga pengelola keuangan membutuhkan waktu dalam hal membuat laporan keuangan yang berdampak pada ketidaktepatan waktu dalam hal pelaporan keuangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diperbaiki dalam penelitian mendatang. Penelitian ini hanya memahami ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah hanya dari aspek komitmen organisasi, pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah dengan pengujian pada satu wilayah kabupaten sehingga memiliki generalisasi yang terbatas. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi faktor-faktor eksternal organisasi lainnya seperti regulasi dan pengawasan keuangan daerah dan faktor eksternal lainnya dengan memperluas

pengujian pada wilayah pemerintahan daerah lainnya sehingga dapat diperbandingkan karena setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Allen, N, Meyer PJ & Smith CA. 1993. Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three Component Conceptualization. *Journal of Applied Psychology*, 78 (4), 538-551.
- Amalia, Iga. 2014. *Analisis Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Way Kanan)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Lampung.
- Andini, Dewi dan Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Universitas Islam Riau.
- Astrawan, Kadek Pande, Made Arie Wahyuni, dan Nyoman Trisna Herawati. 2016. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, kapasitas SDM, Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng. *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Jakarta: Erlangga.
- Daniri, M. A. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Donaldson. Lex, Davis James H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return. *Australian Journal of Management*, 16 (1), 49-65
- Drama, Harken. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian intern sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada SKPD Kota Solok). *Jurnal Akuntansi*, 2 (2), Universitas Negeri Padang.
- Eristanti, Baiq Dwi Apyana, Hermanto, I Nyoman Nugraha Ardana Putra. (2019). Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Ketepatanwaktu Pelaporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26 (1). 622-650.
- Hendriksen, Eldon S & Michael F Van Breda. 2000. *Accounting Theory*. 5 Edition. Herman Wibowo (penterjemah). Jakarta: Interaksa.
- Jaros, S. 2007. Meyer and Allen model of Organizational Commitment: Measurement Issues. *Journal of Organizational Behavior*, 6(4), 7-25.
- Latifah, Asyiyhatul. 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*

Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul). Universitas PGRI Yogyakarta. <http://repository.upy.ac.id/id/eprint/1339>

Lunenburg. 2012. Compliance Theory and Organizational Efektiveness. *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 14 (1).

Luthans, Fred. 2006. *Perilaku organisasi*. Edisi 10. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. ANDI. Yogyakarta.

—————. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. ANDI. Yogyakarta.

Modo, S. M., D.P.E. Saerang, dan A.G. Poputra. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”* 7 (2).

Mokoginta, Novtania, L. L. dan W. P. (017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Riset Akuntansi Going Concern*, 12 (2), 874–890.

Mowday, R.T., Porter, L.W., & Steers, R.M. 1979. *Employee-organization linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover*. New York: Academic Press.

Murapi, Ikang. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal InFestasi*, 12 (2), 131 -143.

Mutiana, Liza, Yossi Diantimala, dan Zuraida. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3 (2), 151-167.

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurillah, A. dan D. Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 (2). <https://ejournal3.undip.ac.id> diakses 8 april 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Permenpan RB No. 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Purwono, Edi. 2004. *Aspek- Aspek EDP Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Rachmawati, S. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap Audit *Delays* dan *Timeliness*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10, 1-10.
- Rahayu, Liza, Kennedy, Anisma, Yuneita. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *JOM FEKON*, 1 (2).
- Rasdianto, Erlina. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.
- Ridha. Basuki. 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) Banjarmasin.
- Rosalin, Faristina & Warsito Kawedar. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Sembiring, Febriadi Leonard. 2007. *Pengaruh kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi Informasi dan SPI terhadap Keandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang)*. Universitas Negeri Padang.
- Tyler, Tom R. 1990. *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale Uni Press.